



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor agraria merupakan salah satu sektor yang penting dalam menunjang kehidupan masyarakat dalam sebuah negara. Indonesia adalah salah satu negara yang dianugerahi lahan yang luas dan subur hingga dijuluki negara agraris. Julukan ini disematkan karena sektor pertanian di Indonesia adalah sektor terpenting dalam perekonomian Indonesia (Aninsi, 2021, para. 1).

Namun dengan memiliki sektor agraria yang unggul tidak menjauhkan Indonesia dari konflik agraria. Konflik agraria sendiri sering ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Sesuai dengan namanya, konflik agraria adalah konflik yang berhubungan dengan tanah atau lahan. Di Indonesia sendiri, perebutan hak milik atas tanah biasanya terjadi antara masyarakat dengan pemangku kekuasaan.

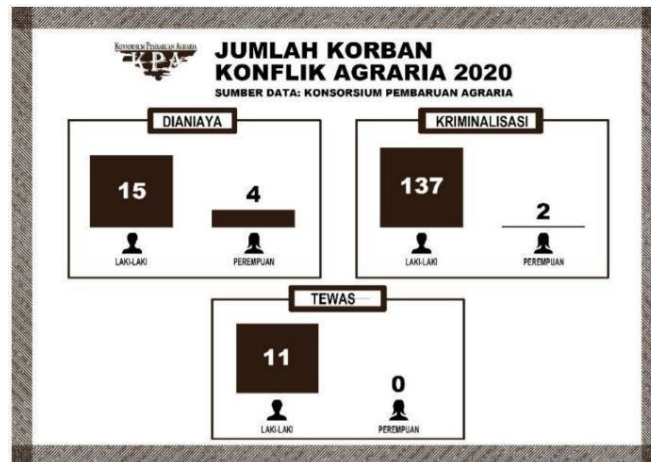
Konflik agraria kerap ditemukan di daerah terpencil yang masih memiliki lahan murni atau belum adanya pembangunan yang masif, seperti kawasan hutan dan perkebunan. Lahan yang masih asli menjadi daya tarik untuk berbagai kepentingan. Hal ini disebabkan karena lahan adalah salah satu faktor penting untuk mendongkrak kehidupan dan kesejahteraan masyarakat (Pattiselanno & Sopamena, 2018, p. 197). Jumlah dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, secara tidak langsung menuntut alam untuk memberikan ruang yang lebih, namun tidak dibarengi dengan kesadaran akan dampak yang ditimbulkan.

KPA (2020, pp. 3-5) mencatat data seputar konflik agraria sepanjang 2020. Jumlah frekuensi konflik agraria di 2020 adalah 241 kasus dan berdampak pada 135.552 kepala keluarga (KK) dengan luas lahan 624.273 hektar. Dari 241 kasus, 122 kasus diantaranya terjadi pada sektor perkebunan dan konflik tersebut masih didominasi oleh perkebunan kelapa sawit sebanyak 101 kasus.

Minyak kelapa sawit digunakan untuk menghasilkan berbagai produk harian dan harganya yang relatif murah menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan di Indonesia. Menurut data dari United States Department of Agriculture, Indonesia dan Malaysia menyumbang hampir 85% produksi minyak kelapa sawit. Pada 2019, Indonesia memproduksi 42,5 juta ton, 58% dari produksi global (McCarthy, 2020, para. 3).

Konflik agraria menimbulkan berbagai macam dampak, diantaranya pengusuran penduduk lokal atau masyarakat adat dari tanah mereka, korban, dan degradasi lingkungan (Yasmi, et al., 2012, p. 100). Seperti kebanyakan konflik yang terjadi, konflik agraria juga terkadang melibatkan tindak kekerasan antara pihak yang terlibat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) (2020, p. 9) menyebutkan sepanjang 2020 telah terjadi 164 kasus kekerasan dan kriminalisasi dari konflik agraria dan 11 orang diantaranya meregang nyawa.

Gambar 1.1 Jumlah Korban Konflik Agraria Sepanjang 2020



Sumber: Konsorsium Pembaruan Konflik Agraria, 2020

Selain memakan korban jiwa, konflik agraria juga bisa berdampak pada keberlangsungan pelestarian lingkungan, apalagi sektor perkebunan kelapa sawit masih menduduki peringkat teratas. Perkebunan kelapa sawit menjadi ancaman serius bagi keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan sumber daya alam. Selain itu, sebagian besar dari masyarakat adat atau penduduk lokal lebih banyak mendapatkan kerugian daripada manfaat yang ditimbulkan perkebunan kelapa sawit (Petrenko et al., 2016, p. 14).

Melihat dampak yang ditimbulkan dari konflik agraria, isu ini menjadi penting untuk dipahami dan diketahui oleh masyarakat. Satu-satunya cara agar masyarakat mengetahui tentang konflik agraria yang terjadi adalah melalui media. Sebuah media yang kuat dan independen, bersama dengan masyarakat, dapat menekan pemerintah untuk mendukung demokrasi dan pembangunan sosial ekonomi yang lebih baik (Limpitlaw, 2012, pp. 12-13). Maka, dengan mengetahui adanya konflik agraria, kesadaran masyarakat akan pentingnya isu ini semakin meningkat atau bahkan melahirkan agen-agen perubahan.

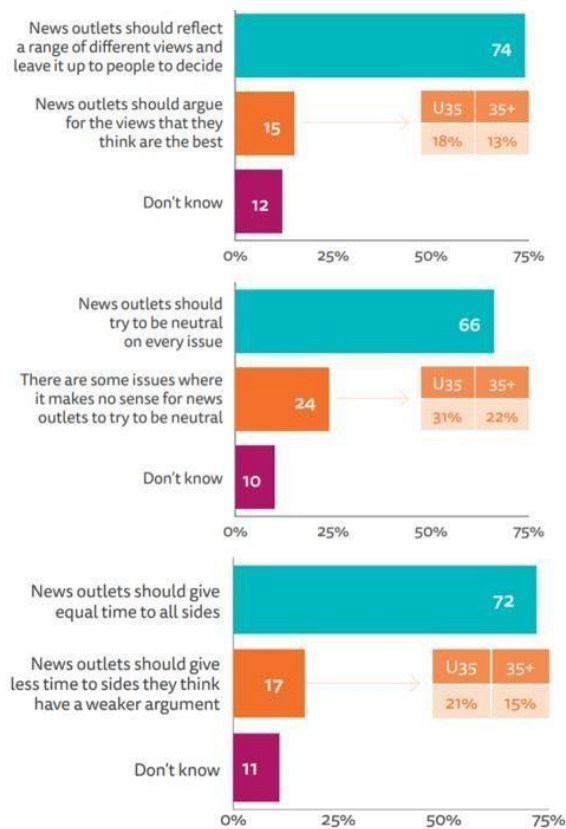
Oleh sebab itu, informasi yang tersaji dalam pemberitaan menjadi sangat penting. Objektivitas adalah salah satu unsur penting dalam sebuah pemberitaan agar tidak menimbulkan opini publik yang tidak melenceng dari informasi yang tertera. Semakin objektivitas sebuah berita, semakin orang tertarik untuk terus mengikuti pemberitaan dari suatu media tertentu. Karena praktik objektivitas membentuk media untuk bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi (McQuail, 2010, p. 170).

Objektivitas adalah konsep yang diciptakan oleh Westerstahl pada 1982. Konsep ini merincikan mengenai unsur pemberitaan yang objektif. Westersthal (1983, p. 404) merincikan objektivitas dengan membaginya menjadi dua dimensi besar, yaitu faktualitas dan imparialitas. Dengan masing-masing menurunkan dua sub-dimensi. Faktualitas menurunkan kebenaran dan relevansi, sedangkan imparialitas adalah keseimbangan dan netralitas.

Namun seiring berkembangnya zaman, konsep ini banyak diperdebatkan. Beberapa ahli berpendapat bahwa objektivitas tidak mungkin terkandung dalam sebuah laporan berita. Bahkan beberapa media di beberapa negara tidak berpedoman pada objektivitas (Schudson & Anderson, 2009, pp. 92-93). Walau banyak perdebatan yang terjadi, masyarakat tetap lebih percaya kepada pemberitaan yang objektif. Dari laporan *Digital News Report 2021* yang diluncurkan oleh Reuters Institute (2021, p. 20), sebanyak 74% setuju bahwa berita harus menampilkan berbagai sudut pandang yang berbeda dan biarkan masyarakat yang menilai. Pencantuman sudut pandang dari pihak-pihak yang terlibat juga

dijelaskan dalam konsep objektivitas. Hasil lainnya menunjukkan sebesar 66% berpendapat berita harus netral dalam melaporkan berbagai isu dan sebanyak 72% memilih pernyataan bahwa media harus memberikan ruang yang sama kepada masing-masing pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa terlepas dari perdebatan pengaplikasian objektivitas pada berita, masyarakat masih menginginkan pemberitaan yang objektif.

Gambar 1.2 Laporan Reuters Institute



Sumber: Reuters Institute (2021, p. 20)

Untuk mengatur gaya pemberitaan yang objektif pada media, Dewan Pers telah merancang Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber – khusus untuk media *online*. KEJ yang mengandung unsur objektivitas

terdapat pada pasal 1,3, dan 8. Ketiga pasal tersebut dan Pedoman Pemberitaan Media Siber tentang bagaimana pemberitaan harus disajikan secara berimbang, akurat, tidak menghakimi, dan berdasarkan fakta. Aturan ini sejalan dengan konsep objektivitas yang ditetapkan oleh Westerstahl.

Media memiliki peran penting untuk menyampaikan berita secara objektif agar tidak terjadi pembentukan opini publik yang tidak berdasarkan fakta dan data. Namun, ada kalanya media tidak memberitakan sebuah peristiwa secara objektif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ichsan Rafi (2020, pp. 144-145), disebutkan bahwa *VICE Indonesia* menjadi salah satu media yang tidak menerapkan komponen-komponen objektivitas, pada pemberitaan dengan isu LGBT, secara menyeluruh. Hasil penelitian tersebut menunjukkan nilai rata-rata objektivitas *VICE Indonesia* sebesar 4,17 dan masuk dalam kategori sedang. Berbeda dengan *Kompas.com* yang memiliki nilai rata-rata 5,17 dan masuk dalam kategori tinggi. Meskipun *Kompas.com* masuk dalam kategori yang tinggi dalam penerapan objektivitasnya, indikator proporsional masih mendapatkan nilai yang rendah. *Kompas.com* cenderung hanya menyertakan narasumber dari satu pihak saja. *VICE Indonesia* yang masih dirasa kurang menerapkan objektivitas dalam pemberitaannya, memiliki lima indikator bernilai rendah. Kelima indikator tersebut adalah faktualitas, akurasi, proporsional, non-evaluatif, dan non-sensasional. Dalam pemberitaannya, *VICE Indonesia* masih cenderung condong dan menyudutkan salah satu pihak.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan beberapa media di Indonesia, khususnya *VICE Indonesia* dan *Kompas.com*, belum memberikan porsi yang

seimbang pada masing-masing pihak yang terlibat. Media masih memiliki kecenderungan untuk berpihak pada salah satu orang atau golongan dalam pemberitaannya.

Dalam mencari berita atau informasi, masyarakat bisa mendapatkannya melalui media. Media *mainstream* adalah salah satu jenis media yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mencari informasi. Di Indonesia sendiri, media *mainstream* masih memiliki kepercayaan publik untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Menurut data dari situs Alexa (2020), 8 dari 10 situs paling populer di Indonesia ditempati oleh media *mainstream*. Media *mainstream* masih dianggap sebagai media yang terpercaya dan dapat melawan berita-berita hoaks (Mudjiyanto & Dunan, 2020, p. 24). Pemberitaan di media *mainstream* umumnya seputar kejadian yang terjadi di masyarakat dan menimbulkan banyak perhatian, seperti isu politik, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Sehingga, narasumber yang terlibat dalam pelaporan berita biasanya memiliki kekuasaan atau nama besar. Media *mainstream* cenderung memberikan tempat yang lebih kepada orang yang memiliki wewenang daripada masyarakat kecil (Harcup, 2003, p. 371) karena nama besar dapat mempengaruhi isi berita (Harcup, 2003, p. 361).

Selain media *mainstream*, masyarakat juga dapat mengonsumsi berita melalui media alternatif. Berbeda dengan media *mainstream*, media alternatif lebih memberikan ruang kepada mereka yang terpinggirkan. Media alternatif menyuarakan apa yang tidak tersampaikan kepada publik (Harcup, 2003, p. 371). Dengan kata lain, media ini menyajikan berita yang tidak bisa didapatkan di media *mainstream*. Hal ini sejalan dengan definisi media alternatif menurut Chris Atton.

Menurutnya, media alternatif adalah model sistem media yang memberikan informasi mengenai sebuah hal yang tidak akan ditemukan di media *mainstream* (Atton, 2002, p. 12). Media alternatif juga bisa digunakan sebagai penggerak untuk melakukan sebuah perubahan. Karena media alternatif berfungsi sebagai pilihan lain dari media *mainstream* yang umumnya fokus pada pemberitaan kaum elite (Bailey et al., 2007, pp. 15-20). Maka, pemberitaan media alternatif memungkinkan untuk adanya unsur keberpihakan yang lebih kepada masyarakat lokal. Menurut Atton (2009, p. 268), media alternatif akan membawa suara komunitas lokal ke dalam pusat pemberitaannya.

Dalam menuliskan sebuah pemberitaan, media di Indonesia memiliki pedoman, yakni KEJ yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Menurut pengertian media alternatif, jenis media ini biasanya memiliki keberpihakan, sedangkan pedoman pemberitaan di Indonesia menampilkan rumusan objektivitas. Maka, peneliti ingin mengetahui tingkat objektivitas pada media alternatif. Selain itu, akan dibandingkan dengan media *mainstream*. Media *mainstream* juga turut dibandingkan karena, jenis media ini umumnya memiliki pangsa yang lebih besar dan lebih dipercaya dalam menyampaikan suatu informasi.

Pada penelitian ini, peneliti akan menggambarkan penerapan objektivitas pada media *online Kompas.com* dan *Mongabay Indonesia*. *Kompas.com* dipilih sebagai salah satu media *mainstream* yang independen dan memiliki jangkauan pembaca yang luas. Sedangkan *Mongabay Indonesia* dipilih sebagai salah satu media alternatif yang berfokus pada isu lingkungan. Selain itu, alasan memilih *Mongabay Indonesia* adalah media ini pernah mendapatkan penghargaan *The Most*

Visited Eco-Focused di internet.

Tingkat penerapan objektivitas di *Kompas.com* dan *Mongabay Indonesia* akan dibandingkan agar dapat diketahui perbedaan keduanya dalam menulis laporan berita. Analisis akan dilakukan dengan berpedoman pada konsep objektivitas yang dikemukakan oleh Westerstahl.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perbedaan pemetaan tingkat objektivitas pada *Mongabay Indonesia* dan *Kompas.com* dalam pemberitaan konflik agraria tahun 2020?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Seberapa tinggi nilai objektivitas pada *Mongabay Indonesia* dan *Kompas.com* dalam pemberitaan konflik agraria tahun 2020?
2. Seberapa tinggi nilai dimensi faktualitas pada *Mongabay Indonesia* dan *Kompas.com* dalam pemberitaan konflik agraria tahun 2020?
3. Seberapa tinggi nilai dimensi imparzialità pada *Mongabay Indonesia* dan *Kompas.com* dalam pemberitaan konflik agraria tahun 2020?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui nilai objektivitas pada *Mongabay Indonesia* dan *Kompas.com* dalam pemberitaan konflik agraria tahun 2020.
2. Untuk mengetahui nilai dimensi faktualitas pada *Mongabay Indonesia* dan *Kompas.com* dalam pemberitaan konflik agraria tahun 2020
3. Untuk mengetahui nilai dimensi imparzialità pada *Mongabay Indonesia* dan *Kompas.com* dalam pemberitaan konflik agraria tahun 2020.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini bisa berguna dalam memberikan uraian bagaimana tingkat objektivitas pada media alternatif dan media *mainstream* dalam membingkai konflik agraria. Penelitian ini juga bisa menjadi sumber rujukan untuk penelitian yang berhubungan dengan tingkat objektivitas media dalam konflik agraria.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi media-media *online* di Indonesia untuk mengikuti standar objektivitas yang baik dalam memberitakan konflik agraria.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat mengenai standar objektivitas dalam media.

1.5.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas karena peneliti hanya fokus pada berita konflik agraria tahun 2020 pada media *Mongabay* Indonesia dan *Kompas.com*. Maka, penelitian ini tidak bisa menggambarkan secara luas bagaimana media-media *online* di Indonesia menerapkan objektivitas pada pelaporan mereka dan dalam berbagai topik pemberitaan.